



RENJA

RENCANA KERJA



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN TENAGA KERJA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Kerja Perangkat.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2021) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2023 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini Semoga Allah SWT selalu meridhoi-Nya.

Banjarmasin, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin


MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.AP.
NIP. 19680111 199303 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan Renja	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	64
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin	67
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	75
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	102
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	108
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	108
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.....	109
3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kerja Perangkat Daerah.....	110
3.4 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021.....	111
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	142

BAB V	PENUTUP	152
-------	---------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel TC-29.....	25
Tabel TC-30.....	74
Tabel TC-31.....	76
Tabel TC-32.....	103
Tabel TC-33.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien, dan efektif meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan



bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang dijabarkan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 yang telah disusun untuk mewujudkan Tema Pembangunan yaitu “Banjarmasin BAIMAN”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Kerja SKPD juga memuat kebijakan, program,



dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

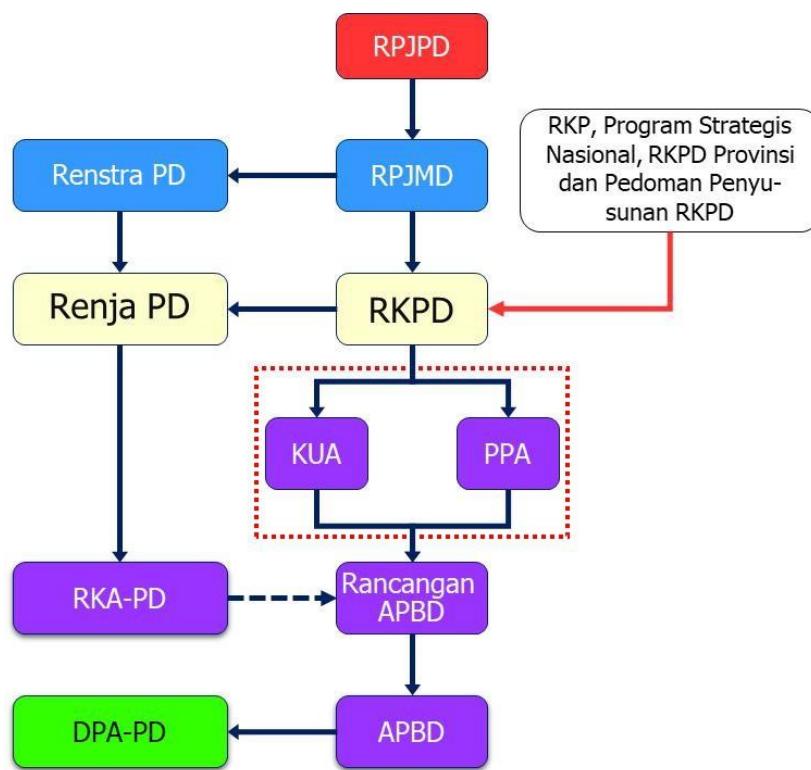
Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun kegiatan baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Renja SKPD dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja SKPD ialah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
2. Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD, evaluasi hasil Renja SKPD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja SKPD tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan RENJA SKPD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja SKPD dan Renja RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja SKPD dalam Forum Lintas SKPD untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
6. Verifikasi Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Tindak lanjut Renja SKPD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. berikut ini:

**Gambar 1.1.
Tindak Lanjut Renja
Dalam Penyusunan APBD**



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); dan



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021;



12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi SKPD berupa rencana kerja dalam rangka kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan program dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Maksud disusunnya Renja Tahun 2023 ini adalah:

- a. Sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung maupun tidak langsung oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
- b. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam satu tahun anggaran;



- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi tolok ukur pada kegiatan tahun selanjutnya; dan
- d. Sebagai acuan arah kebijakan pembangunan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dan menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan, indikator kinerja dan menyusun pagu indikatif serta prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan Renja Tahun 2023 ini ialah:

- a. Untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran pada masing-masing program.
- b. Untuk mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien.
- c. Dapat menetapkan target dalam indikator kinerja yang sesuai dengan tugas fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- d. Dapat menjawab pertanyaan yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, dan pengorganisasian program untuk kegiatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai tupoksinya.
- e. Dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas dan kegiatan di Kota Banjarmasin sehingga terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan.



1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renja SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin.

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA
BANJARMASIN**

PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Lalu

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Pada APBD tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melaksanakan 9 program, 18 kegiatan, dan 37 sub kegiatan dengan anggaran pada APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 13.914.415.031,- sedangkan realisasi keuangan seluruh kegiatan sebesar Rp. 11.380.429.115,- atau 81,79% dan realisasi fisik 100%.

1. Program di tahun 2021 yang terlaksana ada sebanyak 9 program yaitu:

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- (3) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (4) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- (5) Program Hubungan Industrial;
- (6) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- (7) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;



- (8) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); dan
 - (9) Program Pengembangan UMKM.
2. Kegiatan di tahun 2021 yang terlaksana ada sebanyak 18 kegiatan yaitu:
- (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - (2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - (8) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - (9) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit;
 - (10) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - (11) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - (12) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - (13) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran



Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- (14) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- (15) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- (16) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- (17) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; dan
- (18) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

3. Sub-Kegiatan di tahun 2021 yang terlaksana ada sebanyak 37 kegiatan yaitu:

- (1) Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- (2) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- (3) Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;



- (4) Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- (5) Sub Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- (6) Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- (7) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- (8) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- (9) Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- (10) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
- (11) Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- (12) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- (13) Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel;
- (14) Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- (15) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- (16) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- (17) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- (18) Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;



- (19) Sub Kegiatan: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- (20) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- (21) Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- (22) Sub Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- (23) Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
- (24) Sub Kegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja;
- (25) Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- (26) Sub Kegiatan: Job Fair/Bursa Kerja;
- (27) Sub Kegiatan: Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan;
- (28) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan;
- (29) Sub Kegiatan: Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- (30) Sub Kegiatan: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang



Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- (31) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
- (32) Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasional Lembaga;
- (33) Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;
- (34) Sub Kegiatan: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- (35) Sub Kegiatan: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
- (36) Sub Kegiatan: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
- (37) Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta hasil yang dicapai ialah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.825.677.131,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.097.936.927,- (77,92%).
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%).
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.029.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.773.000,- (95,75%).
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.971.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.771.000,- (86,62%).
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 26.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.400.000,- (98,88%).
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.936.000,- (98,40%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 40.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.953.000,- (73,29%).



- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 81.926.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.776.250,- (71,74%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 13.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.034.750,- (98.15%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.020.000,- (85.00%).
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.475.000,- (61.88%).
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 123.515.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.398.605,- (56.19%).
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 179.627.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 176.395.244,- (98.20%).
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.872.615.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.694.992.570,-



(90,51%).

- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 153.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 131.357.327,- (85,84%).
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 273.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.240.756,- (85,94%).
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 155.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.796.813,- (66.15%).
 - Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 316.573.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 295.511.815,- (93,35%).

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- g) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.



- Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.990.000,- (99.95%).
- Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 73.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.789.000,- (87.00%).

3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja

h) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 241.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 213.069.100,- (88,26%).

i) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Sub Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 38.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.205.000,- (90,85%).

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

j) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 130.450.000,- dan terealisasi



sebesar Rp. 107.968.000,- (82,77%).

- Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 165.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.120.000,- (49,60%).

k) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran sebesar Rp. 54.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.525.000,- (98,39%).

5) Program Hubungan Industrial

l) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan dengan anggaran sebesar Rp. 36.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.617.500,- (73,02%).

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan anggaran sebesar Rp. 76.785.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.363.250,- (66,89%).

m) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.



- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 29.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.222.500,- (90,03%).
- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 293.000,- (13,79%),
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- (0%),
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 28.085.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.900.000,- (49,49%).

6) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- n) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan



Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran sebesar Rp. 458.261.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 456.066.500,- (99,52%).

7) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

o) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.374.000,- (98,04%).

8) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

p) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 202.191.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.220.000,- (90,12%).



- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran sebesar Rp. 1.027.288.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 873.109.208,- (84,99%).

9) Program Pengembangan UMKM

- q) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 201.192.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 188.828.000,- (93,85%).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin telah melaksanakan seluruh kegiatan namun karena beberapa hal ada kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel TC-29 sebagai berikut:



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Tabel TC. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Sampai Dengan Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Tahun 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021			Target program kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Tersusunnya Dokumen PK, PK Perubahan, IKU RKT dan RKT Perubahan		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Tersedianya Dokumen Renstra ,Renja, Renja Perubahan,PK, PK Perubahan, IKU,RKT dan RKT Perubahan yg tersusun						8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen							
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen							
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan IKK						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan							
5)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Tersusunnya Laporan Kinerja, Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), LPPD, LKPJ dan IKK		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Evaluasi Renstra Renja dan RFK						3 Laporan	3 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan		100%	100%	100%	100%			100%
		Persentase Terbayarkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		100%	100%	100%	100%			100%
		Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan						53 Orang	53 Orang	100%
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan							
7)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terfasilitasinya Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan						12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

8)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan							
9)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen							
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						4 laporan	4 laporan	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik daerah						100%	100%	100%
		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%							
11)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen RKBMD, RKBMD Perubahan, RKPBM, RKPBM Perubahan						4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen							
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100%	100%	100%
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%							
12)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian sasirangan yg dibeli						60 Stell	60 Stell	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit							
V	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%							
13)	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Sasirangan		44 Stell	44 Stell	44 Stell	100%			100%
		Jumlah pakaian sasirangan yg dibeli						60 Stell	60 Stell	100%
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit							
VI	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%			



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Layanan Administrasi umum						100%	100%	100%
		Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%							
14)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	100%	100%	100%			100%
		Pengadaan komponen instalasi listrik						400 buah	400 buah	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket							
15)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket							
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100%	100%	100%			100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga						1000 Buah, 1 paket	1000 Buah, 1 paket	100%
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket							
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Percentase Tersedia Alat Tulis Kantor		100%	100%	100%	100%			
		Amplop Putih No..110						168 Kotak	168 Kotak	100%
		Lakban						168 Buah	168 Buah	100%
		Isi Staples No..10						20 Buah	20 Buah	100%
		Ordner Folio						420 Buah	420 Buah	100%
		Map Snellhecter						840 Buah	840 Buah	100%
		Map plastik Pakai Jepit						30 Buah	30 Buah	100%
		Double Folio 100						14 Buah	14 Buah	100%
		Buku Agenda Surat Keluar/Masuk						15 Buah	15 Buah	100%
		Cutter L-500						168 Buah	168 Buah	100%
		Binder Clip 155 Width 32 mm						168 Kotak	168 Kotak	100%
		Binder Clip 260 Width 51 mm						168 Buah	168 Buah	100%
		Trigonal Clip No..3						140 Buah	140 Buah	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

	Gunting Kertas Ukuran Sedang						84 Pak	84 Pak	100%
	Isolasi Kecil						249 Buah	249 Buah	100%
	Kertas Fax						8 Pak	8 Pak	100%
	Kertas HVS A4 70 Gram						170 Rim	170 Rim	100%
	Lem Cair						252 Buah	252 Buah	100%
	Lem Stik 21 gram						420 Buah	420 Buah	100%
	Map Batik Ukuran Folio, Motif Batik, 650 gram						84 Pak	84 Pak	100%
	Penggaris Besi						168 Kotak	168 Kotak	100%
	Pensil						420 Buah	420 Buah	100%
	Penghapus Papan Tulis						10 Pak	10 Pak	100%
	Penghapus Pulpen						168 Buah	168 Buah	100%
	Pita Fax						4 Buah	4 Buah	100%
	Pulpen Biasa						500 Buah	500 Buah	100%
	Balliner						300 Buah	300 Buah	100%
	Spidol White Board						420 Buah	420 Buah	100%
	Spidol Permanen						110 Buah	110 Buah	100%
	Stabilo						170 Kotak	170 Kotak	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Staples No.10					20 Buah	20 Buah	100%
		Stempel Dinas					5 Pak	5 Pak	100%
		Bak Stempel					20 Buah	20 Buah	100%
		Post-it 653 (Size 34,9 x 47,66 mm)					168 Buah	168 Buah	100%
		Post-it 653 (Size 47,6 x 73 mm)					84 Buah	84 Buah	100%
		Tempat Isolasi					14 Buah	14 Buah	100%
		Amplop Putih No..90					168 Kotak	168 Kotak	100%
		Kertas HVS F4 / Folio 70 Gram					381 Rim	381 Rim	100%
		Map Biasa					170 Pak	170 Pak	100%
		Pelubang Kertas					30 Buah	30 Buah	100%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket						
18	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Cetakan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		
		Jumlah Penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		100%
		Amplop SKPD					15 Kotak	15 Kotak	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Map SKPD						500 Lembar	500 Lembar	100%
		Blanko Disposisi						60 buku	60 buku	100%
		Spanduk						20 Meter	20 Meter	100%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket							
19)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100%	100%	100%	100%			
		Koran						200 Eksemplar	200 Eksemplar	100%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen							
20)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu		100%	100%	100%	100%			
		Kunjungan yg terfasilitasi						25 kali	25 kali	100%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

21)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100%	100%	100%	100%			100%
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah						1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan							
VII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%							
22)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase tersedianya Meubelair	100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah pengadaan mebel						1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan dan peralatan mesin lainnya						1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit							
24)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya						1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit							
25)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan yg bersifat dalam gedung						2 Paket	2 Paket	100%
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit							
26)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan lainnya		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah paket pengadaan yg bersifat dalam gedung						1 Paket	1 Paket	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit							
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						1 paket	1 paket	100%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit							
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%			
		Pembayaran jasa telpon, internet, air dan listrik						12 Bulan	12 Bulan	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan								
29)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percentase Jasa Kebersihan Kantor		100%	100%	100%	100%				
		Percentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%				
		persentase terselesainya jasa surat menyurat		100%	100%	100%	100%				
		Percentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor		100%	100%	100%	100%				
		Pembayaran jasa tenaga honorer/ pegawai kontrak						12 bulan	12 bulan		100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan								
ix	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%				



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%						100%	100%	100%
30)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara		16 Unit	16 Unit	16 Unit	100%				
		Percentase Terfasilitasinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	100%	100%				100%
		Jumlah Kendaraan Dinas/perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya						16 Unit	16 Unit	100%	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit								
31)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara						111 unit	111 unit	100%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit								



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

32)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%				
		Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		100%	100%	100%	100%				100%
		Terpeliharanya Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%				100%
		Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi yg bersifat luar gedung						3 Gedung	3 Gedung		100%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit								
B	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas		63,4%	63,4%	63,4%	100%				
		Persentase Koperasi Aktif yang Melaksanakan RAT						4,87%	4,87%		100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang terperiksa dan terawasi kegiatannya	24,87%								
X	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Aktif		63,4%	63,4%	63,4%	100%				
		Persentase Meningkatnya Koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku						9,74%	9,74%	100%	
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	10,62%								



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

33)	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koperasi yang termutahirkan Data dan Keragaannya		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan koperasi						90 Koperasi	90 Koperasi	100%
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha							
34)	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Koperasi yang ditata perangkat peraturannya.		100 Koperasi Baru	100 Koperasi Baru	100 Koperasi Baru	100%			
		2. Jumlah Koperasi yang ditata organisasi dan tatalaksananya		40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	100%			



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan koperasi					90 Koperasi	90 Koperasi	100%
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha						
XI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Meningkatnya Koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku					9,74%	9,74%	100%
		Percentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	10,62%						



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

35)	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan koperasi						90 Koperasi	90 Koperasi	100%
		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha							
C	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	70%	70%	70%	70%	100%	3,25%	3,25%	100%
		Persentase Koperasi Aktif yang meningkat kinerjanya	14,80%							
XII	Kegiatan, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Legalisasi Usaha bagi KUM		70%	70%	70%	100%			
		Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi						12,99%	12,99%	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi	18,00%								
36)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengusulkan Badan Hukum Koperasi		3 Kelompok Baru	3 Kelompok Baru	3 Kelompok Baru	100%				
		Jumlah Koperasi		523 Koperasi	523 Koperasi	523 Koperasi	100%				
		Jumlah SDM koperasi dan UMK yang meningkat kapasitasnya		30 Koperasi dan UMK	30 Koperasi dan UMK	30 Koperasi dan UMK	100%				
		Jumlah SDM Koperasi/Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						210 Orang	210 Orang	100%	
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 Orang								
D	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang terfasilitasi permodalan		70%	70%	70%	100%				



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Koperasi yang mengelola Usahanya secara profesional						6,49%	6,49%	100%
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	5,00%							
XIII	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang berkembang usahanya		70%	70%	70%	100%			
		Persentase Koperasi yang berkembang usahanya						8,12%	8,12%	100%
		Persentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	11,73%							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

37)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguanan Kelembagaan, Penataan Manajemen , Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Koperasi dan UMK yang tersosialisasi Permodalan		90 Koperasi dan Umk	90 Koperasi dan Umk	90 Koperasi dan Umk	100%			
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi					90 Koperasi	90 Koperasi	100%	
		Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang							
E	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Tenaga Kerja					100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100%							
XIV	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					100%	100%	100%	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Dokumen Perencanaaan Tenaga Kerja	30 Dokumen								
38)	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro						1 dokumen	1 dokumen		100%
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan								
F	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		50%	50%	50%	100%	22,40%	22,40%		100%
		Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,042%								
		Pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	2,5%								
XV	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja		50%	50%	50%	100%				
		Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja						50%	50%		100%
		Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja	50%								



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

39)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kerja		32 Orang	32 Orang	32 Orang	100%			
		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri						48 org	48 org	100%
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang							
40)	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga Pelatihan							
41)	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

XVI	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Percentase Pencari Kerja yang memiliki keterampilan kerja		50%	50%	50%	100%			
		Percentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi						100%	100%	100%
		Percentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi	100%							
42)	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memahami persyaratan akreditasi		20 LPKS	20 LPKS	20 LPKS	100%			
		Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek						20 LPKS	20 LPKS	100%
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga							
G	Program Penempatan Tenaga Kerja	Percentase Pencari Kerja yang memiliki keterampilan kerja		7,94%	7,94%	7,94%	100%			
		Percentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan						18%	18%	100%
		Percentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	22,40%							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

XVII	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal		7,94%	7,94%	7,94%	100%			
		Persentase Pencari kerja yang memahami Penempatan Tenaga Kerja						100%	100%	100%
		Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	100%							
43)	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabtan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan di Perusahaan		20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%			
		Jumlah siswa yang memahami Bimbingan Jabatan Pencaker						100 Orang	100 Orang	100%
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang							
44)	Pelayanan antar Kerja	Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa kerja Khusus (BKK)						15 SMK	15 SMK	100%
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

45)	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih untuk bekerja di Sektor Usaha Mandiri (Informal)		40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%			
		Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan informal						24 Orang	24 Orang	100%
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	42 Orang							
XVIII	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor formal		15,89%	15,89%	15,89%	100%	15,89%	15,89%	100%
		Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO							
46)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah buku Laporan Informasi Pasar Kerja		57 Eksemplar	57 Eksemplar	57 Eksemplar	100%			
		Audit Sertifikasi Iso		1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100%			
		Audit Sertifikasi Iso						1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang								
47)	Sub Kegiatan Job Fair	Jumlah Pencari Kerja yang terserap di dunia industri/perusahaan sektor formal		500 Orang	500 Orang	500 Orang	100%		-		
		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri						515 0rg	515 0rg	100%	
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	530 Orang								
H	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan		60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7%								



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

XIX	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kasus yang Diselesaikan		60%	60%	60%	100%		100%	
		Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan						20%	20%	100%
		Percentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	15%							
48)	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial (Pekerja)			35 Pekerja	35 Pekerja	100%			
		Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial (Perusahaan))			40 Perusahaan	40 Perusahaan	100%			



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami pentingnya PP/PKB serta mengetahui bagaimana tata cara pembuatan PP/PKB						65 Pekerja/Pengusaha	65 Pekerja/Pengusaha	100%
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	140 Perusahaan							
49)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	1. Jumlah Pekerja yang memahami Struktur Skala Upah/SISN/ UMP/ UMK.		100 Pekerja	100 Pekerja	100 Pekerja	100%			
		2. Jumlah Perusahaan yang memahami Struktur Skala Upah/SISN/ UMP/ UMK		100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%			
		3. Penerbitan SK Upah Minimum Kota.		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami struktur skala upah dan Jaminan Sosial						65 Pekerja	65 Pekerja	100%



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan								
XX	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus yang Diselesaikan		60%	60%	60%	100%				
		Persentase Pekerja/Pengusaha yang memahami perselisihan PHI/PHK						85%	85%	100%	
		Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	15%								
50)	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan).		30 Perusahaan	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100%				



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		2. Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (Pekerja)		20 Pekerja	20 Pekerja	20 Pekerja	100%			
51)	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja/Pengusaha yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI						50 Pekerja/Pengusaha	50 Pekerja/Pengusaha	100%
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara							
52)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Dokumen LKS Bipartit		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
		Jumlah Anggota Serikat Pekerja/senarai Buruh yang telah terverifikasi						10 Serikat Pekerja/senarai buruh	10 Serikat Pekerja/senarai buruh	100%
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

53)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pekerja yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan		35 Pekerja	35 Pekerja	35 Pekerja	100%			
		Jumlah Pengusaha yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan		40 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	100%			
		Jumlah Rekomendasi bahan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan						1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga							
I	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang meningkat omzetnya melalui media promosi	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	100%	3,27%	3,27%	100%
XXI	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah KUMKM yang berkembang usahanya		3,27%	3,27%	3,27%	100%			



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Usaha Mikro menjadi usaha kecil						0,5%	0,5%	100%
		Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	1,39%							
54)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang dibina dan didampingi		50 Umkm	50 Umkm	50 Umkm	100%			
		Jumlah UMKM yang memiliki jaringan dan membangun kemitraan dengan koperasi		75 Umk	75 Umk	75 Umk	100%			
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi Permodalan		75 Umk	75 Umk	75 Umk	100%			
		Jumlah Usaha Mikro yang bermitra						80 Usaha Mikro	80 Usaha Mikro	100%
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	400 Unit Usaha							
54)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya						140 Usaha Mikro	140 Usaha Mikro	100%
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	105 Unit Usaha							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

55)	Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM		100 Umkm	100 Umkm	100 Umkm	100%			
		Jumlah WUB yang mendapat Penghargaan		3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100%			
		Terciptanya Wirausaha Baru		200 WUB	200 WUB	200 WUB	100%			
		Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro						240 Usaha Mikro	240 Usaha Mikro	100%
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha							
J	Program Pengembangan UMKM	Persentase KUMKM yg tersedia sarana usaha dan permodalannya	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
XXII	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase KUMKM yang tersedia sarana usaha dan permodalannya	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
		Meningkatnya orientasi skala usaha mikro menjadi usaha kecil						176 Usaha Mikro	176 Usaha Mikro	100%
		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	525 Usaha Mikro							



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

56)	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta, Desain dan Teknologi	Jumlah Produk UMKM yang terpromosi		300 umkm	300 umkm	300 umkm	100%			
		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi					35,350 Usaha Mikro	35,350 Usaha Mikro	100%	
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha							



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarmasin 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026. Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2021-2026, maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja daerah dua urusan yaitu:

1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro indikator kinerjanya sebagai berikut:
 - a. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset;
 - b. Jumlah koperasi aktif;
 - c. Jumlah koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam;
 - d. Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha koperasi;
 - e. Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi;
 - f. Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya;
 - g. Jumlah pengurus dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan;
 - h. Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - i. Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan fasilitasi kemitraan;
 - j. Jumlah seluruh koperasi;



- k. Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru;
 - l. Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha;
 - m. Jumlah Usaha Mikro yang diinput dalam sistem ODS;
 - n. Jumlah Usaha Mikro yang bermitra;
 - o. Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi, dukungan fasilitasi pemasaran, dukungan fasilitasi pelatihan, dukungan pendampingan kelembagaan; dan
 - p. Jumlah Usaha Mikro keseluruhan.
2. Urusan Ketenagakerjaan indikator kinerjanya sebagai berikut:
 - a. Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - b. Jumlah Program pelatihan yang diselenggarakan sesuai KKNI atau okupasi;
 - c. Jumlah Instruktur yang bersertifikat kompetensi;
 - d. Jumlah Instruktur tersedia keseluruhan;
 - e. Jumlah LPK yang mempunyai perizinan;
 - f. Jumlah LPK yang terakreditasi;
 - g. Jumlah LPK keseluruhan;
 - h. Jumlah lulusan peserta pelatihan;
 - i. Jumlah lulusan peserta pelatihan berkompетensi;
 - j. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Kota Banjarmasin;
 - k. Jumlah CPMI / TKI yang mendapat pelatihan;
 - l. Jumlah CPMI / TKI Puran yang diberdayakan;



- m. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan;
- n. Jumlah Pencaker yang terdaftar;
- o. Jumlah Lowongan yang tersedian di Kota Banjarmasin;
- p. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Kota Banjarmasin;
- q. Jumlah Tenaga Kerja Khusus;
- r. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
- s. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- t. Jumlah Penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja Online (IPK) online (SISNAKER);
- u. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ditentukan;
- v. Jumlah Perusahaan yang menerapkan program produktivitas;
- w. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB);
- x. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP (Peraturan Perusahaan);
- y. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang;
- z. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama);
 - aa. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB);
 - bb. Jumlah Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - cc. Jumlah Perusahaan yang berselisih;
 - dd. Jumlah Perusahaan yang berselisih terkait PHK;



- ee. Jumlah Perselisihan yang bisa diselesaikan melalui perundingan bipartite;
- ff. Jumlah Lembaga Kerjasama tripartite;
- gg. Jumlah Perselisihan yang bisa diselesaikan melalui Perjanjian Bersama;
- hh. Jumlah Perusahaan keseluruhan; dan
- ii. Jumlah Tenaga kerja keseluruhan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin No 28 Tahun 2008 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah perangkat daerah yang melaksanakan dua urusan rumah tangga wajib yaitu urusan Koperasi dan Usaha Mikro dan urusan Ketenagakerjaan.

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam membangun Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja selama lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja merupakan pembangunan



yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin.

Ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mencapai sasaran, antara lain :

1. Masih banyak koperasi yang belum tertata dan berbadan hukum.
2. Masih ada koperasi yang kurang pengetahuan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
3. Sudah banyak kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan koperasi namun belum mengajukan izin pendirian koperasi.
4. Kurangnya pembinaan dan pembekalan kepada Calon Wirausaha baru yang sudah selesai pelatihan.
5. Kebutuhan akan pengembangan kewirausahaan dan produk Usaha Mikro yang kompetitif.
6. Masih belum sesuai antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri.
7. Belum maksimalnya pemahaman peraturan perundang-undang ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha dan lembaga ketenagakerjaan.
8. Belum semua perusahaan menerapkan struktur skala upah.

Isu Strategis sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin adalah :



1. Meningkatkan peran serta koperasi dalam dunia usaha.
2. Menghimpun dan memberikan pengetahuan para pelaku usaha mikro untuk terus maju dan berkembang.
3. Menumbuh kembangkan jiwa dan mental kewirausahaan bagi Wirausaha pemula.
4. Memberikan keahlian pencari kerja untuk memasuki dunia kerja dari sektor formal dan informal serta menempatkan tenaga kerja melalui bursa kerja.
5. Memberikan pelayanan, pembinaan kepada pekerja, pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ada beberapa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang (*SWOT/Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan fungsinya, antara lain :

A. Faktor Kekuatan (*S/Strength*)

Faktor-faktor pendorong/kekuatan (internal) yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam mencapai tujuan, yaitu ;

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam melaksanakan sistem dan mekanisme sesuai tupoksi;
2. Struktur organisasi yang sesuai dengan eksistensi koperasi;



3. Adanya penganggaran untuk pembinaan, pelatihan maupun pengawasan di lingkup tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
4. Terbangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah untuk pelatihan bagi pencari kerja; dan
5. Bertambahnya pegawai fungsional mediator perselisihan hubungan industrial.

B. Faktor Kelemahan (W/Weakness)

Faktor-faktor penghambat/kelemahan (internal) bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuannya yaitu antara lain:

1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam monitoring dan evaluasi;
2. Kurangnya pembinaan dan pembimbingan kewirausahaan bagi para pelaku usaha mikro dan para wirausaha baru;
3. Kurangnya sarana dan prasarana;
4. Kurangnya instruktur pelatihan yang ada;
5. Kurangnya pembinaan dan penyiapan pencari kerja sesuai dengan kemajuan industri; dan
6. Kurangnya pegawai teknis Hubungan Industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada.
7. Kemampuan dan profesionalisme SDM Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja belum memadai; dan



8. Belum adanya data – data yang lengkap mengenai ketenagakerjaan lowongan perusahaan dikarenakan tidak ada pegawai fungsional pengantar kerja.

C. Faktor Kesempatan (*O/Opportunity*)

Faktor-faktor kesempatan (eksternal) yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam mencapai tujuan, yaitu antara lain:

1. Adanya dukungan kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah pusat/provinsi;
2. Potensi Daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan koperasi;
3. Adanya fasilitasi permodalan dari pemerintah pusat/provinsi terkait kepada Koperasi dan UMKM;
4. Adanya aspek pemerataan yang diprioritaskan oleh Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam koperasi sekunder;
6. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi;
7. Kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi;
8. Peran serta pihak ketiga dalam membantu permodalan Usaha Mikro;
9. Peran serta pemerintah pusat/provinsi dalam membantu penyediaan lowongan kerja; dan



10. Peran serta pemerintah dalam menetapkan peraturan tentang tenaga kerja.

D. Faktor Ancaman (*T/Threat*)

Faktor-faktor ancaman (eksternal) bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuannya sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengembangan dan Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Badan Hukum;
2. Kurangnya pengetahuan bisnis para pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro;
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
4. Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat tentang koperasi
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
6. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan;
7. Kurang inovatifnya Pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro; dan
8. Kurangnya pelaku usaha dalam penguasaan teknologi digital.
9. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengusaha terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
10. Kurangnya masyarakat dalam pengalaman usaha;
11. Masih sulitnya masyarakat mendapat sumber-sumber pembiayaan/permodalan dengan biaya rendah;



12. Belum maksimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha, dan Lembaga Ketenagakerjaan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mendukung pencapaian SDGs melalui program dan kegiatan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan wirausaha berperan besar untuk mengembangkan aspek ekonomi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (*Sustainable Development Goal*) terutama untuk mencapai tujuan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kewirausahaan berkontribusi besar untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini ekonomi. Pelaku usaha di Kota Banjarmasin dapat menggeluti bidang UKM dan kewirausahaan.

Berikut ini program dan kegiatan pendukung capaian SDGs Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel TC-30

**Program dan Kegiatan Tahun 2023 Pendukung Capaian Indikator SDGs
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin**

Indikator SDGs	Indikator Program	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target 2023
Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Persentase pencari kerja yang memiliki ketrampilan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilatih untuk bekerja di sektor usaha mandiri (informal)	42 orang
	Persentase pencari kerja yang memiliki ketrampilan kerja Persentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam pasar kerja online (karir Hub)	1500 orang
Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Persentase legalisasi usaha bagi KUM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah SDM Koperasi yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 orang



2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Dalam setiap penyusunan Renja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai / direncanakan sesuai dengan renstra yang telah disusun.

Berdasarkan review dan analisis kebutuhan pada rencana kerja program-program dan kegiatan tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan yang direncanakan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026.

Tabel Review Rencana Kerja RKPD tahun 2023 dapat dilihat selengkapnya pada tabel TC-31 berikut:



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Tabel TC-31

Reviu Terhadap Rencana Kerja RKPD tahun 2023

Rancangan Awal Renja						Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap layanan administrasi Kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik	10.021.152.970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap layanan administrasi Kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik	15.170.261.870
		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik)	25.849.670		Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik)	25.849.670
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	25.849.670	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	25.849.670
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.631.790	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.631.790



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen			Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000
			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan				Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.200.000
			Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen				Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		12.617.880	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	12.617.880
			Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 Laporan	
2.17.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	100%		8.721.565.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	100%	8.721.565.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.700.000.000
			Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	60 Orang			Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	60 Orang	
			Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan tepat waktu	100%			Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan tepat waktu	100%	
			Persentase Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS uang yang ditanggung SKPD	60 Orang			Persentase Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS uang yang ditanggung SKPD	60 Orang	
17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.750.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.750.000
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.540.000
			Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu	100%				Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu	100%	
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen		1.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	1.000.000
			Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu	100%				Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu	100%	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan		13.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	13.275.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	4 laporan			Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	4 laporan	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%	3.300.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%	3.300.000
2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.300.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.300.000
			Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai	4 Dokumen			Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai	4 Dokumen	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	36.000.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit		10.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit	36.000.000
			Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	60 Stell				Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	60 Stell	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%		416.298.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%	695.165.800
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		7.212.590	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	58.004.400
			Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja	100%				Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja	100%	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		11.385.330	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.271.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Percentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja	100%			Percentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja	100%	
2.17.01.2.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	81.004.770	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27.676.200
			Percentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja	100%			Percentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja	100%	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.013.220	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.014.300
			Percentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja	100%			Percentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja	100%	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.000.000
			Jumlah cetak yang dilaksanakan	40 Buku			Jumlah cetak yang dilaksanakan	40 Buku	
		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan	34510 Lembar			Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan	34510 Lembar	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1.318.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000
			Percentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja	100%				Percentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja	100%	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		10.999.890	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	10.000.000
			Percentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik	100%				Percentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik	100%	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		166.364.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	449.999.900
			jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana	1 laporan				jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana	1 laporan	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	183.636.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4.517.244.700
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.836.600	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	106.845.400
			Persentase tersedianya mebel sesuai dengan RKBMD	100%			Persentase tersedianya mebel sesuai dengan RKBMD	100%	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	263.046.800
			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Paket			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Paket	
2.17.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.487.700



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Persentase pengadaan aset tetap lainnya sesuai dengan rencana belanja dan ketentuan	100%			Persentase pengadaan aset tetap lainnya sesuai dengan rencana belanja dan ketentuan	100%	
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.719.514.900
			Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Gedung			Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Gedung	
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.800.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	77.550.000
			Persentase Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%			Persentase Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.335.799.900
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%			Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	477.784.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	599.232.570
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.142.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	236.839.250
		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Air Bersih	12 Bulan			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Air Bersih	12 Bulan	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Listrik	12 Bulan			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Listrik	12 Bulan	
		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet	12 Bulan			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet	12 Bulan	
		Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon	12 Bulan			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon	12 Bulan	
			Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja	100%			Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja	100%	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	291.641.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	362.393.320
			Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	100%			Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	100%	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.568.620	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	597.753.800



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	99.138.835	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	148.733.800
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya sesuai Rencana	12 Unit			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya sesuai Rencana	12 Unit	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	42.742.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	42.520.000
			Percentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana	100%			Percentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana	100%	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	34.867.785	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	187.500.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana	100%			Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana	100%	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	31.820.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	219.000.000
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai Rencana	100%			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai Rencana	100%	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang terperiksa dan terawasi kegiatannya	24,87%	302.084.500	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang terperiksa dan terawasi kegiatannya	24,87%	302.084.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	10,62%	302.084.500	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	10,62%	302.084.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha	302.084.500	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha	302.084.000
			Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang-undangan koperasi	90 Koperasi			Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang-undangan koperasi	90 Koperasi	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase Koperasi Aktif yang meningkat kinerjanya	14,80%	462.660.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Percentase Koperasi Aktif yang meningkat kinerjanya	14,80%	371.587.800
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi	18,00%	462.660.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi	18,00%	371.587.800
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 Orang	462.660.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 Orang	371.587.800
			Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang			Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	5,00%		196.167.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	5,00%	193.314.200
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	11,73%		196.167.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	11,73%	193.314.200
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang		196.167.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	193.314.200



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	120 Koperasi			Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	120 Koperasi	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	1,39%	1.830.843.875	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	1,39%	2.015.864.800
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya	176 Usaha Mikro	1.830.843.875	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya	176 Usaha Mikro	2.015.864.800
2.17.07.2.01	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya	80 Usaha Mikro	881.483.650	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	400 Unit Usaha	881.483.500
			Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya	80 Usaha Mikro			Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya	80 Usaha Mikro	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	105 Unit Usaha	46.651.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	105 Unit Usaha	46.651.000
			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya	60 Usaha Mikro			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya	60 Usaha Mikro	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	902.709.225	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	1.087.730.300
			Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya	350 Usaha Mikro			Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya	350 Usaha Mikro	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,20%	1.071.503.400	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,20%	1.071.503.160
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	525 Usaha Mikro	1.071.503.400	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	525 Usaha Mikro	1.071.503.160
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	1.071.503.400	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	1.071.503.160



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya	525 Usaha Mikro			Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya	525 Usaha Mikro	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100%	213.664.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100%	213.663.900
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaaan Tenaga Kerja	30 Dokumen	213.664.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaaan Tenaga Kerja	30 Dokumen	213.663.900
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan	213.664.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan	213.663.900
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	30 dokumen			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	30 dokumen	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,042%	1.110.729.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,042%	1.110.729.100
			Pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	2,5%	53.845.000		Pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	2,5%	55.760.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja	50%	1.051.384.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja	50%	1.051.384.100



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang		483.384.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	483.384.100
			Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi)	64 Orang				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi)	64 Orang	
2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga Pelatihan		18.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga Pelatihan	18.000.000
			Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama	3 Lembaga Pelatihan				Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama	3 Lembaga Pelatihan	
2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit		550.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	550.000.000



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

			Jumlah Sarana pelatihan kerja	1 Paket			Jumlah Sarana pelatihan kerja	1 Paket	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi	100%	59.345.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi	100%	59.345.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	59.345.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	59.345.000
			Jumlah LPKS yang yang dibina	20 LPKS			Jumlah LPKS yang yang dibina	20 LPKS	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja	50%	53.845.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja	50%	55.760.000
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	53.845.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	55.760.000
			Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya	20 orang			Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya	20 orang	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan kerja antar dalam wilayah kota	22,40%	512.654.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan kerja antar dalam wilayah kota	22,40%	816.863.700
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	8,2%	226.138.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	8,2%	530.347.800



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	8,2%	226.138.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	8,2%	530.347.800
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	9.845.000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	202.500.000
			Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja	15 SMK			Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja	15 SMK	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	38.445.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	150.000.000
			Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan	500 Orang			Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan	100 Orang	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	42 Orang	177.848.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	42 Orang	177.847.800
			Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta	42 Orang			Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta	42 Orang	



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO	286.516.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO	286.515.900
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	97.800.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	97.800.000
			Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	19 Laporan			Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	19 Laporan	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	530 Orang	188.716.000	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	530 Orang	188.715.900
			Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja	530 Orang			Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja	530 Orang	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7%	328.387.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7%	471.560.900
2.07.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Percentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	15%	209.985.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	15%	290.862.800



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	140 Perusahaan	45.450.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	140 Perusahaan	80.096.200
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB	140 Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB	140 Perusahaan	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	164.535.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	210.766.600
			Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial	150 Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial	150 Perusahaan	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	15%	118.402.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	15%	180.698.100
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	38.037.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	75.170.200



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja		2.125.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.499.900
			Jumlah Anggota Serikat Pekerja/senikat Buruh yang telah terverifikasi	10 Serikat Pekerja/senikat buruh			Jumlah Anggota Serikat Pekerja/senikat Buruh yang telah terverifikasi	10 Serikat Pekerja/senikat buruh		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		78.240.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	89.028.000
			Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan	1 Laporan			Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan	1 Laporan		
Total					Rp	16.129.540.415				21.819.043.100



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin diperoleh melalui pembahasan musrenbang kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kecamtana dan Forum SKPD. Pembahasan ini dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal dengan kesepakatan hasil musrenbang kota.; Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan ada beberapa usulan kegiatab yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Dari 22 usulan yang masuk ada 19 usulan yang direncanakan dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yaitu usulan:

1. Pelatihan Menjahit;
2. Pelatihan Tata Boga;
3. Pelatihan Servis Motor;
4. Pelatihan Komputer Basic Office; dan
5. Pelatihan Teknik Las.

Dua usulan yang tidak bisa diakomodir disebabkan oleh pengusulan merupakan ranah wewenang dari dinas lain yaitu 2 usulan merupakan wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan 1 usulan merupakan wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun usulan yang dapat diakomodir dapat dilihat dalam tabel TC 32 berikut ini:



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

No.	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jln Simpang Pangambangan RT. 029, Kel Pengambangan Kota, Banjarmasin Timur	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 orang	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Diakomodir untuk 5 orang dari 20 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 45 tahun
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. A Yani Km.. 3,5 Komplek Beringin RT. 25 kelurahan Karang Mekar, Banjarmasin Timur	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Diakomodir untuk 1 orang dari 20 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 45 tahun
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl. Kenanga I No. 3 Sekretariat PKK Kelurahan Bunga, Banjarmasin Tengah	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mik	5 orang	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Diakomodir untuk 5 orang dari 20 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 45 tahun



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl. Tembus Mantuil Gg. Pantai RT. 29 RW.02 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 orang	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Diakomodir untuk 5 orang dari 20 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 45 tahun
5	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jl. Dahlia Kebun Sayur RT. 13 RW.02 (Kantor/Aula Kelurahan Mawar), Banjarmasin Tengah	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 orang	Pelaksanaan Pelatihan Menjahit Diakomodir untuk 5 orang dari 20 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 45 tahun
6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Dahlia Kebun Sayur RT. 13 RW.02 (Kantor/Aula Kelurahan Mawar), Banjarmasin Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. AES Nasution Gg. Syiar Islam RT.08 RW.01 Kelurahan Gadang, Banjarmasin Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. AES Nasution Gg. Jambu RT.01 RW.01 Kelurahan Gadang, Banjarmasin Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Batu Piring RT. 12 RW.002 Kantor Keluarahan Antasan Besar, Banjarmasin Tengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
10	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Dahlia Gg. Budaya RT. 33 RW.03 Kelurahan Telawang Kota, Banjarmasin Barat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Ir. P.H.M. Noor RT. 34 RW.02 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Ir. PHM. Noor RT. 34 RW.02 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Servis Motor Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun



13	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Muhajirin II RT. 20 RW 002 Kelurahan Pekauman, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
15	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Sepakat RT. 030, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Tata Boga Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Ir. PHM. Noor RT. 34 RW.02 Kelurahan Pelambuan, Banjarmasin Barat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Servis Motor Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Kelayan B Kecil RT. 15 Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Pelatihan Komputer Basic Office Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

18	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Pelatihan Komputer Basic Office Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	JL. Kelayan B Gg. Cempaka RT.; 13 Kelurahan Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 orang	Pelaksanaan Teknis Las Diakomodir untuk 1 orang dari 16 peserta pelatihan dengan syarat umur 18 s/d 40 tahun



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan koperasi karena koperasi dan UMKM dinilai mampu berperan sebagai penggerak Ekonomi Produktif dan Ekonomi Kerakyatan. Pemerintah selalu berperan memberi dukungan, pemberdayaan, juga memberi peluang usaha kepada koperasi. Keberadaan koperasi tidak hanya berkepentingan terhadap pelayanan kepada anggotanya saja tapi juga terhadap perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin



Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 nomor 25) maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

Sesuai dengan Perubahan RPJMD tahun 2021 – 2026 maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin masuk dalam misi keempat yaitu: Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat ikut serta mewujudkan pembangunan daerah dan dapat melaksanakan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin maka disusun Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.



3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN:

Terbukanya Lapangan Kerja

2. SASARAN :

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi



2. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam Berusaha
3. Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri
4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
5. Terselesaikannya Sengketa Permasalahan Ketenagakerjaan.

3.4 Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah. (UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16) dan PP Nomor 8 Th 2008 Pasal 1 Ayat 13).

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2021 – 2026, KUMKM merupakan aset yang dapat diandalkan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, maka ada beberapa program Program Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk Tahun 2023.

Dari program-program yang terdapat di RPJMD tersebut di atas dapat disimpulkan ada beberapa program prioritas SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dimana program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal.



Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kota Banjarmasin tahun 2023 pada prinsipnya mengacu pada Renstra, namun tetap menyesuaikan pada kebutuhan sehingga terlihat perbedaan pagu indikatif pada Renstra dan Renja. Dokumen Renstra disusun untuk perkiraan pelaksanaan 5 (lima) tahun ke depan sehingga memasukkan perkiraan penambahan biaya akibat inflasi. Hal ini menyebabkan tingginya pagu indikatif untuk kegiatan fisik.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dilihat pada Tabel TC-33 berikut:



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

Tabel TC-33

**Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Sumber Dana : SEMUA)**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7		3	5	6	7
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap layanan administrasi Kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik	10.021.152.970	APBD		Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik	10.555.503.435	APBD
		Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik	25.849.670	APBD					
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	25.849.670	APBD		Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	27.142.154	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.631.790	APBD	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.963.380	APBD
		Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen			Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan	8 Dokumen		
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000	APBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.000	APBD
		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen		
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.000	APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.310.000	APBD
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 Dokumen		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2.200.000	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.310.000	APBD
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen					Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen		
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		12.617.880	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	13.248.774	APBD
		Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 Laporan					Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 Laporan		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	100%	8.721.565.000	APBD		Cakupan Dokumen penatausahaan Keuangan yang lengkap dan sesuai ketentuan	100%	9.157.643.250	APBD
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.700.000.000	APBD		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	9.135.000.000	APBD
		Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	60 Orang				Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	60 Orang		
		Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan tepat waktu	100%				Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan tepat waktu	100%		
		Persentase Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS uang yang ditanggung SKPD	60 Orang				Persentase Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS uang yang ditanggung SKPD	60 Orang		
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.750.000	APBD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.037.500	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	100%		
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.540.000	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.617.000	APBD
		Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu	100%			Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu	100%		
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	1.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	1.050.000	APBD
		Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu	100%			Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu	100%		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	13.275.000	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	13.938.750	APBD
		Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	4 laporan				Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	4 laporan		
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%	3.300.000	APBD		Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	100%	3.465.000	APBD
2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.300.000	APBD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.465.000	APBD
		Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai	4 Dokumen				Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai	4 Dokumen		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%		10.000.000	APBD		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	10.500.000	APBD
2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit		10.000.000	APBD		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 Unit	10.500.000	APBD
		Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu	60 Stell					Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu	60 Stell		
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%		416.298.700	APBD		Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%	443.264.298	APBD
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		7.212.590	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.573.220	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja	100%			Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja	100%		
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.385.330	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.954.597	APBD
		Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja	100%			Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja	100%		
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	81.004.770	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	85.055.009	APBD
		Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja	100%			Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja	100%		
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.013.220	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	135.314.544	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja	100%				Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja	100%		
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.000.000	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	15.750.000	APBD
		Jumlah cetak yang dilaksanakan	40 Buku				Jumlah cetak yang dilaksanakan	40 Buku		
		Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan	34510 Lembar				Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan	34510 Lembar		
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.318.900	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.384.845	APBD
		Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja	100%				Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja	100%		
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	10.999.890	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	11.549.885	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik	100%				Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik	100%		
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	166.364.000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	174.682.200	APBD
		jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana	1 laporan				jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana	1 laporan		
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	183.636.600	APBD		Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	192.818.430	APBD
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.836.600	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	29.228.430	APBD
		Persentase tersedianya mebel sesuai dengan RKBMD	100%				Persentase tersedianya mebel sesuai dengan RKBMD	100%		
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Paket				Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Paket		
2.17.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.000.000	APBD		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.550.000	APBD
		Percentase pengadaan aset tetap lainnya sesuai dengan rencana belanja dan ketentuan	100%				Percentase pengadaan aset tetap lainnya sesuai dengan rencana belanja dan ketentuan	100%		
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	APBD		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	105.000.000	APBD
		Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Gedung				Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Gedung		
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	44.800.000	APBD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	47.040.000	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Persentase Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%				Persentase Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	APBD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	APBD
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%				Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	477.784.050	APBD		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	501.673.253	APBD
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	186.142.850	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.449.993	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Air Bersih	12 Bulan				jumlah Bulan Pembayaran Jasa Air Bersih	12 Bulan		
	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Listrik	12 Bulan				jumlah Bulan Pembayaran Jasa Listrik	12 Bulan		
	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet	12 Bulan				jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet	12 Bulan		
	jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon	12 Bulan				jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon	12 Bulan		
	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja	100%				Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja	100%		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	291.641.200	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	306.223.260	APBD
		Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	100%				Persentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	100%		
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.568.620	APBD		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	218.997.051	APBD
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	99.138.835	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	104.095.777	APBD
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya sesuai Rencana	12 Unit				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya sesuai Rencana	12 Unit		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	42.742.000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	44.879.100	APBD
		Persentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana	100%				Persentase Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana	100%		
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	34.867.785	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	36.611.174	APBD
		Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana	100%		
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	31.820.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	33.411.000	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Percentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai Rencana	100%				Percentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab sesuai Rencana	100%		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang terperiksa dan terawasi kegiatannya	24,87%	302.084.500	APBD		Percentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang terperiksa dan terawasi kegiatannya	30,57%	317.188.725	APBD
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	10,62%	302.084.500	APBD		Percentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Aturan yang berlaku	16,25%	317.188.725	APBD
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha	302.084.500	APBD		Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	90 Unit Usaha	317.188.725	APBD
		Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang-undangan koperasi	90 Koperasi				Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang-undangan koperasi	90 Koperasi		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif yang meningkat kinerjanya	14,80%	462.660.000	APBD		Persentase Koperasi Aktif yang meningkat kinerjanya	20,50%	485.793.000	APBD
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi	18,00%	462.660.000	APBD		Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM Pengurus, Pengelola, pengawas dan anggota Koperasi	23,20%	485.793.000	APBD
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 Orang	462.660.000	APBD		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	210 Orang	485.793.000	APBD
		Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang				Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	210 Orang		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	5,00%	196.167.000	APBD		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	7,00%	205.975.350	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	11,73%	196.167.000	APBD		Persentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	17,33%	205.975.350	APBD
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	196.167.000	APBD		Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	120 Orang	205.975.350	APBD
		Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	120 Koperasi				Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	120 Koperasi		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	1,39%	1.830.843.875	APBD		Persentase Usaha Mikro yang telah mendapatkan Fasilitasi Program Pemberdayaan	1,36%	1.922.386.069	APBD
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya	176 Usaha Mikro	1.830.843.875	APBD		Jumlah Usaha Mikro yang berkembang usahanya	176 Usaha Mikro	1.922.386.069	APBD
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	400 Unit Usaha	881.483.650	APBD		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	400 Unit Usaha	925.557.833	APBD
		Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya	80 Usaha Mikro				Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya	80 Usaha Mikro		
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	105 Unit Usaha	46.651.000	APBD		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	105 Unit Usaha	48.983.550	APBD
		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya	60 Usaha Mikro				Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya	60 Usaha Mikro		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	902.709.225	APBD		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	947.844.686	APBD
		Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya	350 Usaha Mikro				Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya	350 Usaha Mikro		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,20%	1.071.503.400	APBD		Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,30%	1.125.078.570	APBD
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	525 Usaha Mikro	1.071.503.400	APBD		Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	525 Usaha Mikro	1.125.078.570	APBD
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	1.071.503.400	APBD		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	1.125.078.570	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya	525 Usaha Mikro				Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya	525 Usaha Mikro		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100%	213.664.000	APBD		Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100%	224.347.200	APBD
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaaan Tenaga Kerja	30 Dokumen	213.664.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencananaan Tenaga Kerja	30 Dokumen	224.347.200	APBD
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan	213.664.000	APBD		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan	224.347.200	APBD
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	30 dokumen				Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	30 dokumen		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,042%	1.110.729.000	APBD		Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,05%	1.222.802.700	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	2,5%	53.845.000	APBD		Pertumbuhan tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	2,5%		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja	50%	1.051.384.000	APBD		Persentasi Pencari Kerja Yang Memiliki Keterampilan Kerja	50%	1.103.953.200	APBD
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 Orang	483.384.000	APBD		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi)	64 Orang	507.553.200	APBD
		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi)	64 Orang				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi)	64 Orang		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga Pelatihan	18.000.000			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun	3 Lembaga Pelatihan	18.900.000	
		Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama	3 Lembaga Pelatihan				Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama	3 Lembaga Pelatihan		
2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	550.000.000			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	577.500.000	
		Jumlah Sarana pelatihan kerja	1 Paket				Jumlah Sarana pelatihan kerja	1 Paket		
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi	100%	59.345.000	APBD		Persentase LPKS yang memahami persyaratan akreditasi	100%	62.312.250	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	59.345.000	APBD		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	62.312.250	APBD
		Jumlah LPKS yang yang dibina	20 LPKS				Jumlah LPKS yang yang dibina	20 LPKS		
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja	50%	53.845.000	APBD		Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja	50%	56.537.250	APBD
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	53.845.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	56.537.250	APBD
		Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya	20 orang				Jumlah Pekerja yang meningkat Produktivitasnya	20 orang		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Percentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan kerja antar dalam wilayah kota	22,40%	512.654.000	APBD		Percentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah Kota (%)	22,80%	538.286.700	APBD
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	100%	226.138.000	APBD		Percentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal	8,4%	237.444.900	APBD
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	9.845.000	APBD		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	10.337.250	APBD
		Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja	15 SMK				Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja	15 SMK		
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	38.445.000	APBD		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	40.367.250	APBD
		Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan	500 Orang				Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan	500 Orang		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	42 Orang	177.848.000	APBD		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	42 Orang	186.740.400	APBD
		Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta	42 Orang				Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta	42 Orang		
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO	286.516.000	APBD		Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO	300.841.800	APBD
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	97.800.000	APBD		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	102.690.000	APBD
		Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	19 Laporan				Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	19 Laporan		



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	530 Orang		188.716.000	APBD		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	530 Orang		198.151.800	APBD
		Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja	530 Orang					Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja	530 Orang			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7%		328.387.000	APBD		Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	9%		344.806.350	APBD
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	15%		209.985.000	APBD		Percentase Perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	20%		220.484.250	APBD
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	140 Perusahaan		45.450.000	APBD		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	140 Perusahaan		47.722.500	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB	140 Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB	140 Perusahaan		
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	164.535.000	APBD		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	172.761.750	APBD
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial	150 Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial	150 Perusahaan		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	15%	118.402.000	APBD		Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	14%	124.322.100	APBD
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	38.037.000	APBD		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	120 Perkara	39.938.850	APBD



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

		Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI	120 Perusahaan				Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI	120 Perusahaan		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.125.000	APBD		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Serikat Pekerja/senikat buruh	2.231.250	APBD
		Jumlah Anggota Serikat Pekerja/senikat Buruh yang telah terverifikasi	10 Serikat Pekerja/senikat buruh				Jumlah Anggota Serikat Pekerja/senikat Buruh yang telah terverifikasi	10 Serikat Pekerja/senikat buruh		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	78.240.000	APBD		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Laporan	82.152.000	APBD
		Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan	1 Laporan				Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan	1 Laporan		
Total				16.129.540.415					16.942.168.099	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan dan pelatihan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Menyusun berbagai program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 2021-2026 serta kebijakan strategis lainnya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 sesuai PMDN Nomor 90 Tahun 2019 terdapat 10 program, 21 kegiatan, dan 53 subkegiatan. Adapun rincian Program dan kegiatan tersebut antara lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu indikatif sebesar Rp. 10.047.002.640,- yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pagu anggaran Rp. 8.721.565.000,- dengan Sub kegiatan :
 - 1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Rp. 8.700.000.000,-
 - 1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD pagu anggaran Rp. 5.750.000,-



1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD pagu anggaran Rp. 1.540.000,-

1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan pagu anggaran Rp. 1.000.000,-

1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pagu anggaran Rp.

13.275.000,-

2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah pagu anggaran Rp. 25.849.670,- dengan Sub Kegiatan :

2.1.Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

pagu anggaran Rp. 6.631.790,-

2.2.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

pagu anggaran Rp. 2.200.000,-

2.3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD pagu anggaran Rp. 2.200.000,-

2.4.Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu anggaran Rp.

12.617.880,-

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pagu

anggaran Rp. 3.300.000,- dengan Sub Kegiatan :

3.1.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

pagu anggaran Rp. 3.300.000

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pagu anggaran Rp.

10.000.000,- dengan sub kegiatan :



- 3.1.Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai pagu anggaran Rp. 10.000.000,-
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu anggaran Rp. Rp. 416.298.700,- dengan sub kegiatan :
- 5.1.Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu anggaran Rp. 7.212.590,-
- 5.2.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran Rp. 11.385.330,-
- 5.3.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga pagu anggaran Rp. 81.004.770,-
- 5.4.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu anggaran Rp. 123.013.220,-
- 5.5.Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan pagu anggaran Rp. 15.000.000,-
- 5.6.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan pagu anggaran Rp. 1.318.900,-
- 5.7.Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pagu anggaran Rp. 10.999.890,-
- 5.8.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu anggaran Rp. 166.364.000,-
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu anggaran RP. 183.636.600,-
- 6.1.Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pagu anggaran Rp. 27.836.600,-



6.2.Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya pagu anggaran Rp. 11.000.000,-

6.3.Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp. 100.000.000,-

6.4.Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp. 44.800.000,-

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran Rp. 477.784.050,-

7.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu anggaran Rp. 186.142.850,-

7.2.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu anggaran Rp. 291.641.200,-

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah pagu anggaran Rp. 208.568.620,-

8.1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu anggaran Rp. 99.138.835,-

8.2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran Rp. 42.742.000,-

8.3.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp. 34.867.785,-

8.4.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu anggaran Rp. 31.820.000,-



b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi pagu indikatif Rp. 302.084.500,- yang terdiri dari :

9) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten / kota pagu anggaran Rp. 302.084.500,-

9.1.Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota pagu anggaran Rp. 302.084.500,-

c) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 462.660.000,- yang terdiri dari:

10) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp 462.660.000,-

10.1.Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pagu anggaran Rp. 462.660.000,-

d) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pagu anggaran Rp. 196.167.000,- yang terdiri dari:

11) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 196.167.000,-



11.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 196.167.000,-

e) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) pagu anggaran Rp. 1.830.843.875,- yang terdiri dari:

12) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pagu anggaran Rp. 1.830.843.875,-

12.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro pagu anggaran Rp. 881.483.650,-

12.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pagu anggaran Rp. 46.651.000,-

12.3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pagu anggaran Rp. 902.709.225,-

f) Program Pengembangan UMKM pagu anggaran Rp. 1.071.503.400,- yang terdiri dari:

13) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pagu anggaran Rp. 1.071.503.400,-



13.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi pagu anggaran Rp. 1.071.503.400,-

g) Program Perencanaan Tenaga Kerja pagu anggaran Rp. 213.664.000,- yang terdiri dari:

14) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) pagu anggaran Rp. 213.664.000,-

14.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro pagu anggaran Rp. 213.664.000,-

h) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pagu anggaran Rp 1.164.574.000 yang terdiri dari:

15) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit pagu anggaran Rp. 1.051.384.000,-

15.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pagu anggaran Rp. 483.384.000,-

15.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja pagu anggaran Rp. 18.000.000,

15.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota pagu anggaran Rp. 550.000.000,-



16) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pagu anggaran

Rp. 59.345.000,-

16.1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pagu anggaran Rp. 59.345.000,-

17) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

pagu anggaran Rp. 53.845.000,-

17.1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga

Kerja pagu anggaran Rp. 53.845.000,-

i) Program Penempatan Tenaga Kerja pagu anggaran Rp. 512.654.000,- yang terdiri dari:

18) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 226.138.000,-

18.1. Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja pagu anggaran Rp. 9.845.000,-

18.2. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja pagu anggaran Rp. 38.445.000,-

18.3. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pagu anggaran Rp. 177.848.000,-

19) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja pagu anggaran Rp.

286.516.000,-

19.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online pagu anggaran Rp. 97.800.000,-



19.2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja pagu anggaran Rp. 188.716.000,-

j) Program Hubungan Industrial pagu anggaran Rp. 328.387.000,- yang terdiri dari:

20) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota Pagu anggaran Rp. 209.985.000,-

20.1. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Pagu anggaran Rp. 45.450.000,-

20.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan pagu anggaran Rp. 164.535.000,-

21) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota pagu anggaran Rp. 118.402.000,-

21.1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota pagu anggaran Rp. 38.037.000,-

21.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta Non Afiliasi pagu anggaran Rp. 2.125.000,-



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

21.3.Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Kabupaten / Kota pagu anggaran Rp.
78.240.000,-

**BAB V****PENUTUP**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 sebagai suatu dokumen perencanaan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja tahun 2023.

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tidak menjadikan faktor kelemahan sebagai kendala tapi akan menjadikannya sebagai kunci keberhasilan yakni memanfaatkan secara optimal kuantitas personil yang kurang memadai dengan meningkatkan kualitas dan integritasnya serta dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seefektif mungkin.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan, peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan,



dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua aparat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2023.

Renja ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu pelaksanaan Renja ini, membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian Renja ini diharapkan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran, dan berdaya guna, serta sesuai dengan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan.

B. Saran :

1. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin akan membawa



2023

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA

kemajuan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin


H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE, M.AP
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19680111 199303 1 006